

**ANALISIS PELAKSANAAN WAJIB LATIHAN KERJA SEBAGAI PENGANTI
PIDANA DENDA YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA
(STUDY PADA KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG)**

Oleh:

Muhammad

Abstract

That the imposition of imprisonment and a fine of subsidiary compulsory vocational training for juvenile delinquents should be considered to include the child judges place or institution authorized to carry out the required job training. In order for the Prosecution no difficulty in carrying out the court's decision. It required an understanding in applying Act No. 3 of 1997 on Juvenile Justice, so that law enforcement officials, especially judges children, to ensure legal certainty for the creation of a sense of justice for the child. That being the wrong interpretation of the regulations specifically Legislation Law No. 3 Year 1997 on Juvenile Justice, the Implementing Regulations need to be made clear that the implementation of compulsory vocational training for children in legal penalties with mandatory training subsidiary of work carried on in institutions particular, in order to guarantee the implementation of court decisions that have permanent legal force (incraht).

Key words : brat, Act No. 3 of 1997 on Juvenile Justice

Abstrak

Bahwa Penjatuhan pidana penjara dan denda dengan subsidair wajib latihan kerja terhadap anak nakal seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak untuk mencantumkan tempat atau lembaga mana yang berwenang melaksanakan wajib latihan kerja tersebut. Agar Jaksa Penuntut Umum tidak kesulitan dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin kepastian hukum guna terciptanya rasa keadilan bagi anak tersebut. Bahwa agar tidak terjadinya Penafsiran yang salah terhadap peraturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perlu dibuatkan Peraturan Pelaksanaan yang menjelaskan bahwa pelaksanaan wajib latihan kerja bagi anak yang di hukum denda dengan subsidair wajib latihan kerja di laksanakan di lembaga tertentu, guna menjamin terlaksananya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht).

Kata Kunci : anak nakal, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Pendahuluan

Di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada butir a bagian menimbang menyebutkan “bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang.”

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia atau sumber daya generasi muda yang berkualitas dan mampu memimpin dan serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa di seluruh dunia, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan umat manusia di seluruh dunia.

Dari beberapa pernyataan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa anak sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa, yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, memerlukan perlindungan dari berbagai bahaya yang mengganggu perkembangan anak. Adanya pembangunan nasional yang merupakan modernisasi, membawa dampak negatif dan dampak positif. Banyak peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu dengan semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana atau kenakalan anak atau meningkatnya deviasi serta meningkatnya anak-anak terlantar.

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas baik ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh anak pelaku tindak pidana atau meningkatnya kenakalan anak yang mengarah kepada tindakan kriminal, mendorong kita lebih banyak memberi perhatian akan penanggungan serta penanganannya, khusus di bidang hukum pidana (anak), beserta hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.¹

Dalam masyarakat dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu, dimana anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat luas.

¹ Agung Wahyono, Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993 hal 24.

Penurunan peranan dan kualitas diri terjadi juga dikalangan anak-anak. Kreativitas kemauan dan kemampuan mengembangkan pemikiran dan melakukan kegiatan eksploratif, melakukan aksi sosial untuk berani melakukan hal yang baru mengalami hambatan, sehingga pada akhirnya menghambat proses kaderisasi bangsa. Di padang dari sudut formil, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang oleh (dalam hal ini negara) dikenakan pidana. Ditinjau lebih dalam lagi sampai pada intinya bertentangan dengan kesusilaan. Di kota-kota besar khususnya sering terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, termasuk anak sekolah, dan remaja misalnya di Kota Singkawang berupa perkelahian antar pelajar, pencurian, pencabulan terhadap anak-anak dan penganiayaan terhadap anak.

Cara mengatasi dan menyelesaikan kenakalan yang dilakukan oleh anak ini, sudah diatur di dalam undang-undang tentang anak, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini disusun guna memberikan petunjuk kepada para penegak hukum, khususnya Hakim di Pengadilan, Jaksa dalam hal penuntutan dan Penasehat hukum, agar bisa adil dalam memberikan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Berlakunya undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan dampak yang baik bagi anak yang terjerat dalam kasus pidana, karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini membuat para aparat penegak hukum mempunyai dasar hukum guna menentukan apakah seorang anak pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana penjara kurungan, pidana denda atau pidana wajib latihan kerja.

Seperti halnya yang terjadi pada wilayah hukum Kota Singkawang. Berdasarkan data atau beberapa dokumen putusan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Singkawang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak antara tahun 2009 sampai dengan 2011 terdapat 11 perkara dengan pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 80 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang di putus dengan pidana kumulatif, sanksi pidana penjara ditambah dengan sanksi pidana denda (dalam kasus penganiayaan terhadap anak Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).

Khususnya terhadap perkara tindak pidana yang pelakunya masih anak-anak, hakim dapat menjatuhkan pidana kepada anak pelaku tindak pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal seperti pidana penjara,

pidana kurungan, pidana denda dan atau pidana pengawasan. Pada saat hakim menjatuhkan pidana denda, kemudian pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh anak pelaku tindak pidana tersebut, maka berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Selain itu pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja. Dijelaskan juga pada Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari. Sampai saat ini Jaksa yang mempunyai wewenang selaku eksekutor tidak mempunyai landasan hukum dalam melaksanakan eksekusi wajib latihan kerja, baik mengenai tempatnya, maupun bentuk wajib latihan kerja sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Permasalahan

1. Apakah hambatan Jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan wajib latihan kerja bagi anak pelaku tindak pidana yang tidak membayar denda?
2. Lembaga manakah yang berwenang dalam melaksanakan wajib latihan kerja bagi anak pelaku tindak pidana?
3. Peraturan perundang-undangan mana saja yang harus diperbaharui agar dapat mendukung pelaksanaan wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi Anak Pelaku Tindak Pidana?

Pembahasan

A. Hambatan Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Melaksanakan Wajib Latihan Kerja Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Membayar Denda.

Dalam kepustakaan dan doktrin ditekankan bahwa, tujuan pemidanaan yang mempunyai fungsi perlindungan dan kesejahteraan menjadi pandangan yang banyak diikuti oleh para ahli hukum pidana saat ini. Para ahli hukum pidana berpendapat bahwa pemidanaan diusahakan untuk lebih manusiawi dan menjaga harkat dan martabat dari

terpidana sehingga ketika dia kembali ke masyarakat, terpidana menjadi orang yang berguna di masyarakat.

Perampasan kemerdekaan atas diri anak, hendaknya tetap memperhatikan penghormatan hak-hak asasi anak, yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan tempat kegiatan yang bermanfaat demi peningkatan kesehatan dan munculnya *self-respect* pada diri anak dalam rangka mempersiapkan anak berintegrasi di masyarakat.

Tujuan pemidanaan yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada pelaku tindak pidana sesuai juga dengan tujuan pemidanaan yang sesungguhnya. Dalam konteks ini, penekanannya pada situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan melalui penjatuhan pidana tersebut. Pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Jadi pemidanaan terhadap anak bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi perkembangan anak termasuk dalam anak yang dituntut karena pelanggaran hukum pidana. Dengan demikian pemidanaan terhadap anak nakal haruslah tetap memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi perkembangan fisik dan psikis anak. Instrumen-instrumen Internasional seperti *Beijing Rules*, *Riyadh Guidelines*, dan Peraturan PBB (*United Nation Conventions*) memberikan perlindungan bagi pelaku tindak pidana yang belum berumur 18 tahun ketika menghadapi proses peradilan sampai pemberian putusan.

Anak pelaku tindak pidana akan tumbuh dan berpotensi menjadi penjahat dewasa di masa depan, jika tidak ditangani secara tepat. Penjatuhan pidana pada pelaku yang belum berumur 18 tahun diharapkan mencapai tiga tujuan yaitu :

- a. Bahwa pidana dan penanganan orang yang belum berumur 18 tahun akan lebih ditujukan pada perbaikan individu,
- b. Bahwa pidana dan tindakan sedapat mungkin harus disesuaikan pada pandangan hidup yang terbatas dari pelaku yang berumur kurang dari 18 tahun,
- c. Bahwa dengan pidana dan tindakan, akan dicegah pengulangan kejahatan dan jumlah residivis akan berkurang.

Prinsip pencerminan keadilan sosial anak ini selanjutnya tersirat pula dari berbagai ketentuan di setiap tahapan proses peradilan anak. Tuntutan agar anak tetap diperhatikan dalam proses peradilan anak dan pemberian kesempatan diskresi seluas-luasnya pada setiap tingkatan pemeriksaan merupakan cerminan dari prinsip tersebut. Di samping perlu diperhatikannya hak-hak anak dalam kontak awal anak dengan penegak hukum (polisi) dan penggunaan sarana yang berupa *diversion*. Hak-hak anak itu antara lain:

1. Hak untuk diberitahukannya tuduhan (*the right to be notified of the charges*)
2. Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*)
3. Hak untuk memperoleh penasehat hukum (*the right to counsel*)
4. Hak untuk hadirnya orang tua/wali (*the right to the presence of a parent or guardian*)
5. Hak untuk menghadapi saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confront and cross-examine witnesses*)
6. Hak untuk banding ke tingkat yang lebih atas (*the right to appeal to a higher authority*)

Ditegaskan bahwa, pada proses penyidikan dan penuntutan, dituntut agar ada kejelasan mengenai pihak-pihak yang diberi wewenang dalam proses penyidikan dan penuntutan dimaksud. Dalam hal ini terkait dengan pemberian kesempatan pada orang tua dan penasihat hukum untuk terlibat selama proses penyidikan dan penuntutan, penyediaan laporan sosial anak dan penyusunan kriteria yang jelas tentang penempatan anak dalam lembaga yang mempunyai kewenangan.

Prinsip yang harus diperhatikan dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah, penempatan anak di dalam lembaga pemasyarakatan harus ditempatkan sebagai usaha terakhir dan dalam jangka waktu yang pendek. Dalam instrumen internasional diatur juga beberapa konvensi yang memberikan perlindungan kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Perlindungan ini tidak hanya mengenai hak-hak normatif anak saja tetapi juga ada perlindungan terhadap anak yang akan dikenakan sanksi pidana. Perlindungan itu berupa pengenaan tindakan daripada pidana. Pidana sebagai alternatif terakhir dan jangka waktunya diusahakan sesingkat mungkin. Pemberian pembedaan perlakuan terhadap perkara anak adalah salah satu bentuk perlindungan yang diakui dalam Undang Undang Tentang Pengadilan Anak. Asas *ultimum remedium* atau asas yang menggunakan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan perkara anak tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan dari hukum pidana anak atau dalam hal ini pemidanaan yang terdapat dalam Undang Undang Tentang Pengadilan Anak. Pemidanaan anak di sini diatur dalam pasal 22 sampai pasal 32. Pemberian sanksi terhadap anak nakal dalam undang undang ini bukan hanya dengan diberikan berupa pemidanaan tetapi juga dengan pemberian tindakan. Pemberian sanksi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam

masyarakat yang bersangkutan, diberikan sanksi yang berbeda. Menurut pasal 25 Undang Undang Tentang Pengadilan Anak :

Pasal 25

- 1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- 2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Dalam penjelasannya disebutkan :

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu Hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Selain itu, sistem pemidanaan anak dalam Undang Undang ini memuat juga sanksi pidana bersyarat, sebagaimana terdapat dalam pasal 29. Pidana bersyarat ini dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pelaku dipidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2(dua) tahun. Alternatif lain adalah pidana pengawasan yang dapat juga dijatuhkan tetapi hanya untuk anak nakal yang melakukan tindak pidana. Pidana Pengawasan ini lama penjatuhannya paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun.

Pengaturannya terdapat dalam pasal 30, yang menyebutkan :

Pasal 30

- 1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- 3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Dalam Penjelasannya disebutkan :

Yang dimaksud dengan ‘pidana pengawasan’, adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari, di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Memang dalam pengaturan tersebut di atas tidak secara eksplisit tercantum bahwa pemberian pidana terhadap anak nakal merupakan upaya terakhir / *ultimum remedium* dalam menyelesaikan perkara anak. Penjatuhan sanksi pidana atau tindakan terhadap perkara anak masih digantungkan pada putusan hakim anak. Namun dalam menerapkan hukum positif hakim tetap harus memahami doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum (Pidana) sebagai salah satu sumber hukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dari 10 (sepuluh) Jaksa Penuntut Umum, yang mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara anak-anak hanya 2 (dua) orang Jaksa Penuntut Umum, karena memiliki Surat Keputusan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sebagai Jaksa Anak. Dari hasil penelitian terhadap Jaksa Anak tersebut ditemukan fakta bahwa dalam menangani perkara anak yang di putus hakim dengan hukuman denda subsidair wajib latihan kerja, akan tetapi anak tersebut tidak mampu membayar denda, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang menurut UU diberi wewenang selaku Eksekutor, kesulitan untuk melakukan eksekusi wajib latihan kerja tersebut karena belum ada peraturan atau petunjuk pelaksanaannya.

Seharusnya sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa “Apabila hakim memutuskan bahwa Anak Nakal Wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.

Oleh karena itu hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang merupakan cita-cita penegakan hukum di Indonesia. Hal ini juga memberikan stigma atau dampak yang buruk kepada pelaku (terpidana) dalam hal ini anak yang harus dilindungi kepentingannya (masa depan anak). Seharusnya terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tempat atau lembaga yang melaksanakan wajib latihan kerja tersebut agar Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor tidak kesulitan dalam melaksanakan eksekusi.

B. Lembaga Manakah Yang Berwenang Dalam Melaksanakan Wajib Latihan Kerja Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.

Menurut Pasal 60 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak Negara dan anak sipil. Penempatan ini dilakukan terpisah dari narapidana dewasa. Bagi anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan, baik formal maupun informal sesuai bakat, dan kemampuannya serta memperoleh hak-hak lainnya.

Selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan Anak, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana Anak dan Anak Didik Pemasyarakatan. Selain Lembaga Pemasyarakatan Anak dikenal juga Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yaitu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Pada prinsipnya, tidak ada penjara bagi anak bahkan Konvensi Hak Anak tidak membenarkan adanya penjara anak. Apabila harus direhabilitasi, perlakuan yang diterima seorang anak harus berbeda dengan tindakan yang dikenakan terhadap orang dewasa yang melanggar hukum di dalam lembaga pemasyarakatan. Ketika dijatuhi vonis dan ditetapkan telah melanggar hukum, maka pemulihan atas kenakalan seorang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang layak. Sehingga anak menjalaninya bukan lagi seperti orang yang dihukum (dipenjarakan).

Lembaga Pemasyarakatan Anak harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika kembali ke masyarakat akan bisa mematuhi nilai - nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pembinaan mental, meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga Negara yang masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, maka mereka dididik untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan bangsa dengan berbekal mental dan keterampilan yang dimiliki, mereka diharapkan dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat.

Disadari bahwa untuk melaksanakan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih besar daripada pelaksanaannya termasuk dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Dalam hal sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Telah banyak para ahli yang membahas dan memberikan pengertian mengenai masa anak-anak, antara lain ditinjau dari segi umur ataupun ciri-ciri lainnya.

Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No.1 Tahun 1951 telah ditetapkan bahwa anak-anak yaitu yang berusia 14 tahun kebawah. Sedangkan menurut UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang ketentuan pokok kesejahteraan anak. Anak adalah seorang yang mencapai usia 21 tahun kebawah dan belum kawin. Kategori usia seorang anak di Indonesia sangatlah bervariasi. Hukum kita masih memberikan definisi yang berbeda tentang anak, tetapi dalam konvensi PBB tentang anak itu diberikan batasan usia 18 tahun kebawah dengan sama sekali tidak membedakan apakah sudah kawin atau belum kawin.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dalam hak asasi tersebut disebutkan tentang berbagai hal antara lain : Hak Anak yaitu :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martab kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, diasuh, oleh orangtuanya sendiri.
5. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh dan berkembangnya anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan atau jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spriritual, dan social.
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

8. Khususnya bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pembangunan diri.

Menurut Pasal 1 butir (3) UU No. 12 Tahun 1995, yang dimaksud dengan “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik pemasyarakatan”. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi serta resosialisasi.

Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Narapidana dalam UU ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dalam tata peradilan pidana.

Lembaga pemasyarakatan yang berkembang sekarang ini menganut sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan arah dan batas serta cara pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada dasarnya bahwa lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat penampungan orang – orang jahat yang mana mereka telah dicap sebagai sampah masyarakat yang hanya bisa mengganggu ketenangan masyarakat dan hanya bisa bersifat parasit dalam lingkungan masyarakat luas. Masyarakat pada umumnya belum mengetahui secara jelas apa yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, masyarakat hanya mengetahui bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai sebuah bangunan yang berupa dengan siksaan dan sebagai

penampungan orang – orang jahat seperti : penodong, pencuri, pembunuh dan sebagainya yang mengganggu ketenangan masyarakat saja dan ditangkap oleh pihak yang berwenang agar ketenangan masyarakat dapat terjamin karenanya.

Seperti halnya dalam perkara nomor : 75/Pid.Sus/AN/2011/PN. SKW, pelaku yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana yang masih di bawah umur yang bernama Terdakwa ARIFIN Als RIFIN Bin ASWI, Dkk pada saat melakukan tindak pidana masih berumur 15 (lima belas) tahun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Melakukan, menyuruh melakukan atau atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap anak”, Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, menjatuhkan pula pidana denda terhadap masing-masing terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu soma kurang lebih berukuran 0,5 (nol koma lima) meter dirampas untuk dimusnahkan. Perbuatan yang dilakukan para terdakwa melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Pada pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi : “Setiap orang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

Selain itu dalam perkara nomor : 187/Pid.Sus/2011/PN. SKW, pelaku yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana yang masih di bawah umur yang bernama Terdakwa RYAN PRADHANA BIN HENDRY HADY pada saat melakukan tindak pidana masih berumur 16 (enam belas) tahun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan, menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dalam kemasan plastik klip shabu-shabu bersih 0,60

gram, 1(satu) potongan kartu remmy gambar joker merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RH 112 dirampas untuk dimusnahkan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi” Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Hakim Anak dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus yang dilakukan oleh anak, putusan hakim seperti halnya perkara-perkara diatas yaitu menjatuhkan pidana penjara dan denda dengan subsidair wajib latihan kerja, akan tetapi di dalam Diktum Putusan Hakim tidak mencantumkan lembaga mana yang harus melaksanakan wajib latihan kerja tersebut, sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa “Apabila hakim memutuskan bahwa Anak Nakal Wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.

Dikarenakan di dalam diktum Putusan Hakim yang tidak mencantumkan lembaga mana yang harus melaksanakan wajib latihan tersebut menyebabkan adanya keraguan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak dalam hal mengkoordinasikan pelaksanaan putusan hakim tersebut apabila anak yang melakukan tindak pidana tersebut telah selesai menjalani masa pidana penjaranya.

Selain harus berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak juga mengalami kendala dikarenakan sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dimana dan bagaimana pelaksanaan putusan hakim tentang wajib latihan kerja bagi anak pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu perlu adanya suatu aturan atau tempat atau lembaga yang di buat oleh pemerintah dalam hal melaksanakan putusan hakim yang menjatuhkan putusan wajib latihan kerja bagi anak pelaku tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi anak pelaku tindak pidana yang di jatuhi hukuman wajib latihan kerja.

C. Peraturan Perundang-Undangan yang harus diperbaharui agar dapat mendukung Pelaksanaan Wajib Latihan Kerja sebagai pengganti Pidana Denda bagi Pelaku Tindak Pidana Anak.

Undang-undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah berlaku selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun. Undang Undang ini mengatur secara khusus mekanisme pemidanaan dan pemberian tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana yang masih berusia kurang dari 18 tahun. Dengan demikian substansi Undang Undang ini lebih lengkap dibandingkan dengan pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 KUHP Keberadaan Undang Undang Tentang Pengadilan Anak ini memberikan harapan akan tersedianya peraturan hukum yang mengkhususkan pengaturan terhadap anak nakal.

Peraturan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan dan menurut peraturan hukum lain yang berlaku di masyarakat.

Dalam Undang Undang Tentang Pengadilan Anak terdapat pengaturan tentang batas usia anak yang menjadi kompetensi absolutnya, sanksi pidana yang dapat diancamkan, hukum acara, dan tindakan (*maatregel*) bagi anak nakal pelaku tindak pidana (anak nakal dan anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak). Mekanisme perlindungan dan pembinaan dalam Undang Undang Pengadilan Anak mencerminkan perlindungan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Perkara anak yang menjadi kompetensi pengadilan anak semakin lama semakin meningkat jumlah perkaranya, hal ini disebabkan selain karena faktor ekonomi dari anak tersebut juga karena tujuan pemidanaan secara umum (*general deterrence*) yaitu mencegah masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana berjalan kurang efektif.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang Pengadilan Anak berbeda dengan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 67 yang isinya adalah sebagai berikut : “Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Adanya perlindungan pada anak yang dijatuhi pidana dalam undang undang ini tercermin dalam ketentuan di bawah ini Pasal 26 ayat 1 Undang Undang Pengadilan Anak yang isinya sebagai berikut : “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Maksimum pidana penjara yang diancamkan juga tidak boleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Selain itu, pidana mati juga tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Anak yang isi pasal selengkapnya adalah sebagai berikut :

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a) pidana penjara;
- b) pidana kurungan;
- c) pidana denda; atau
- d) pidana pengawasan.

Selain itu perlindungan yang diberikan tidak hanya dalam hukum materiil saja tetapi juga dalam hukum formil. Sekalipun dalam Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 diatur secara khusus hukum acara untuk pengadilan anak, namun masih memakai KUHAP sebagai hukum generalisnya.

Selanjutnya penegasan tentang batas umur minimum dan maksimum dalam undang-undang ini sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak nakal. Meningkatnya jumlah perkara anak dan recidivis anak menunjukkan pembedaan yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak masih menunjukkan kelemahan. Banyaknya putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada tindakan terhadap anak nakal (seperti wajib latihan kerja), sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi dari pembedaan dalam hukum pidana anak.

Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pembedaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir (*ultimum remedium/the last resort principle*) dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. Penjatuhan pidana sebagai *ultimum remedium* atau *the last resort principle* adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Asas *ultimum remedium* atau *the last resort* untuk pembedaan anak juga memiliki landasan hukum dalam Instrumen-Instrumen Internasional yaitu *Beijing Rules*, *Riyadh Guidelines*, Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya. Ketentuan hukum internasional seperti *Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice)* menegaskan bahwa sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran

hukumnya. Anak-anak hanya dapat dihilangkan kebebasannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam *The Beijing Rules*.

Dari hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Singkawang diperoleh fakta bahwa dari beberapa dokumen putusan Pengadilan Negeri Singkawang antara tahun 2009 sampai dengan 2011 terdapat 11 perkara dengan pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 80 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hakim Anak dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus yang dilakukan oleh anak, hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda dengan subsidair wajib latihan kerja, akan tetapi di dalam Diktum Putusan Hakim tidak mencantumkan lembaga mana yang harus melaksanakan wajib latihan kerja tersebut, sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa “Apabila hakim memutuskan bahwa Anak Nakal Wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf C, Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan.

Hakim berdalih bahwa tidak mencantumkan lembaga tempat latihan kerja karena sampai saat ini belum ada lembaga resmi yang ditunjuk untuk tempat latihan kerja bagi terpidana anak. Ini membuat tidak adanya kepastian hukum terhadap terpidana anak khususnya yang dikenai putusan pidana denda dengan subsidair wajib latihan kerja, dimana akan dilaksanakan wajib latihan kerja dimaksud. Oleh karena itu perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tempat dimana anak tersebut melaksanakan wajib latihan kerja tersebut sebagai pengganti pidana denda yang tidak mampu dibayar oleh terpidana anak.

Selain itu pada putusan hakim terhadap perkara yang dilakukan oleh anak di dalam diktumnya menjatuhkan putusan dengan akumulasi tindak pidana penjara dan tindak pidana denda, padahal di dalam Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa “Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah Pidana Pokok dan Pidana Tambahan” sedangkan pidana Penjara dan dan denda sama-sama termasuk dalam Jenis Pidana Pokok.

Hakim berdalih bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak di dasarkan pada ketentuan dari pasal yang telah di dakwakan terhadap terdakwa, bukan berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, padahal seperti

diketahui bahwa ada Asas yang mengatur bahwa apabila ada aturan yang lebih khusus, maka aturan umum harus dikesampingkan.

Penutup

1. Bahwa Penjatuhan pidana penjara dan denda dengan subsidair wajib latihan kerja terhadap anak nakal seharusnya menjadi pertimbangan hakim anak untuk mencantumkan tempat atau lembaga mana yang berwenang melaksanakan wajib latihan kerja tersebut. Agar Jaksa Penuntut Umum tidak kesulitan dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Untuk itu diperlukan pemahaman dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sehingga aparat penegak hukum, khususnya hakim anak, dapat menjamin kepastian hukum guna terciptanya rasa keadilan bagi anak tersebut.
2. Bahwa agar tidak terjadinya Penafsiran yang salah terhadap peraturan Perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, perlu dibuatkan Peraturan Pelaksanaan yang menjelaskan bahwa pelaksanaan wajib latihan kerja bagi anak yang di hukum denda dengan subsidair wajib latihan kerja di laksanakan di lembaga tertentu, guna menjamin terlaksananya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (incraht).
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak sudah tidak relevan lagi di terapkan pada zaman sekarang, oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak tersebut khususnya mengenai lembaga atau tempat .

Daftar Pustaka

- Agung Wahyono, Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- B. Sandjaja, MSPH., Dr dan Albertus Heriyanto, M.Hum, Panduan Penelitian, Prestasi Pustaka, September 2011
- Bahder Johan Nasution, DR, M.Hum, S.H, SM, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, 2008.
- Barda Nawawi Arief, S.H, Dr, Prof, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Cetakan ke-3, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Barda Nawawi Arief, Prof, S.H, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.
- Chandra Halim, S.H., M.Hum, Perlindungan Hukum terhadap anak di bidang kesejahteraan, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000
- Cesare Beccaria, Perihal Kejahatan dan Hukuman, Penerjemah Wahmuji, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Darwan Prinst, S.H., Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

- Dra. MS. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum & Chandra Halim, S.H., M.Hum, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2003
- Eddy O.S. Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Endang Sumiarni, Dr. Dra. MS., S.H., M.Hum, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003
- Emiliana Krisnawati, Prof. Dr. S.H., MPA, Msi, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV. Utomo, Bandung, 2005
- Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Suatu Tinjauan Khusus Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2007.
- Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya, CV. Mandar Maju, Maret, 2005
- Mochammad Faisal Salam, S.H., M.H., Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Cetakan ke-3, Alumni, Bandung, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1995
- Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta Sinar Grafika, 2007.
- Paulus Hadisuprpto, S.H. M.H., Dr, Prof. Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, Bayumedia Publishing, Malang, April 2008.
- R.M. Surachman, S.H & Dr. Andi Hamzah, S.H., Jaksa di berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Sholeh Soeaidy, S.H., Drs. Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Cv. Novinda Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Sri Widowati Wiratmo, Anak dan wanita dalam hukum, Lp3es, Jakarta, 1982
- Suhariyono AR, Dr, S.H., M.H., Pembaruan Pidana Denda di Indonesia (Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif), Papas Sinar Sinanti, Jakarta 2012
- Tongat, Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Umm Press, Malang, 2004.
- WagiatiSoetodjo, Dr., S.H., M.S, Hukum Pidana Anak, CV. Refika Aditama, Bandung 2006
- Widya Novita, Serba-serbi Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

A. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak